

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PENUBA TIMUR DI KABUPATEN LINGGA**

**Oleh:  
Ari Anggara  
NIM.170574201030**

## **Abstrak**

Korupsi adalah macam perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak-pihak lain, namun disisi lain merugikan keuangan negara. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai Rp 1 Miliar. Adanya kasus yang menyeret oknum paratur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal dan diawasi oleh semua lapisan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga serta apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di Kabupaten Lingga. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan sosio legal dengan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala desa penuba timur yang karena jabatannya menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, terkait penegakan hukum yang dilakukan bahwa kejaksaan dan kepolisian telah melakukan tugasnya sesuai SOP dan kewenangannya masing-masing, namun terdapat hambatan dalam penanganan kasus korupsi dana desa penuba timur yang mana terdapat pelaku yang melarikan diri sehingga menghambat penegakan hukum itu sendiri serta berkaitan dengan penggantian kerugian keuangan negara terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan asset yang ia miliki, Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dana yaitu faktor desakan kebutuhan ekonomi, dan faktor kesempatan karena jabatan sebagai kepala desa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di kabupaten lingga serta apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di kabupaten lingga

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Tindak Pidana

**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF CORRUPTION FUNDS IN  
EAST PENUBA VILLAGE IN LINGGA REGENCY**

**By  
Ari Anggara  
NIM.170574201030**

***Abstract***

*Corruption is a type of act related to the abuse of power owned by public officials to benefit or enrich themselves or other parties, but on the other hand is detrimental to state finances. The issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages makes village funds something very tempting because the value of village funds reaches IDR 1 billion. The existence of cases that dragged village officials, made the financial management of village funds really really needed to be monitored and supervised by all levels. In terms of enforcing corruption in the regions, there are two law enforcers who are more dominant in conducting investigations into corruption crimes, namely the police and the prosecutor's office, although the command for law enforcement against corruption is still in the Corruption Eradication Commission after the issuance of Law No. 30 of 2002 on the Eradication Commission. Corruption. The purpose of this study is to see how the law enforcement of corruption in the East Penuba village fund in Lingga Regency is and what are the factors causing the corruption of the East Penuba village fund in Lingga Regency. The research method that the author uses is a socio-legal approach with the type of empirical law research, namely research with field data as the main data source. The results of this study indicate that there has been corruption by the head of the village of East Penuba who because of his position has misused village funds for personal interests, related to law enforcement that the prosecutor and police have carried out their duties according to the SOP and their respective authorities, but there are obstacles in handling the case of corruption in the east penuba village fund where there were perpetrators who fled so that it hindered law enforcement itself and related to compensation for state financial losses the defendant could not return state financial losses in accordance with the assets he had. economy, and the opportunity factor because of his position as village head. The conclusion in this study is that it is known how the law enforcement of corruption in the Penuba Timur village funds is known in Lingga Regency and what are the factors causing the occurrence of corruption in the Penuba Timur village funds in Lingga Regency.*

*Keywords: Law Enforcement, Village Fund Corruption, Criminal Act*